

# **Analisis Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*) Studi Kasus pada Program Desa Maju Inhil Jaya di Kabupaten Indragiri Hilir**

Muhammad Arif<sup>1</sup> Suci Shinta Lestari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Abdurrahman Pekanbaru

<sup>2</sup>Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Abdurrahman Pekanbaru

muhammad.arif@univrab.ac.id

**ABSTRAK:** Rendahnya kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat desa dalam mengelola pembangunan perlu segera ditindaklanjuti dengan suatu program pemberdayaan masyarakat desa. Upaya mempercepat pembangunan, khususnya di pedesaan erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa. Partisipasi masyarakat ini dimulai dari perumusan persoalan, perencanaan, pengelolaan, pengendalian kegiatan dan penilaian keberhasilan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) di Kabupaten Indragiri Hilir secara umum dapat dikatakan sudah dilaksanakan secara optimal sesuai kebijakan yang telah dirumuskan. Pelaksanaan Program DMIJ dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 3 tahap yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelestarian. Namun masih ditemukan beberapa kendala, yakni; faktor keterbatasan jumlah dana karena sumber pendanaan program DMIJ sebahagian besar bersumber dari Alokasi Dana Desa yang jumlahnya 10% dari total APBD, sementara besaran APBD Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Selanjutnya faktor masih terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam menggunakan perangkat teknologi komputer, sehingga masih menjadi faktor penghambat lemahnya pengoprasionalan yang berbasis aplikasi.

**Kata Kunci :** Pemberdayaan desa, Indragiri Hilir

**Abstract:** *Low capacity of the Government of the village and village community in managing the construction needs to be quickly followed up with empowerment programme of village community. Accelerating development efforts, especially in rural areas closely related to community participation and independence village. Community participation starts from the question of the formulation, planning, management, control and assessment of the success of development activities. Based on the results of the research can be drawn the conclusion that the Program implementation Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) in Kabupaten Indragiri Hilir in General can be said have been conducted optimally appropriate policies which have been formulated. The implementation of the Program DMIJ in the community empowerment in Kabupaten Indragiri Hilir consists of 3 stages the planning stages, the stages of implementation and preservation stage. But still found some constraints, namely; factors of limited amount of funding because funding sources program DMIJ mostly sourced from the village Fund Allocations totaling 10% of the total APBD, while the magnitude of a APBD Kabupaten Indragiri Hilir fluctuative from year to year. The next factor is still*

*the limited human resources in the use of computer technology, so still a weak inhibitor of operational factor based applications.*

**Keywords :** *Community Empowerment, Indragiri Hilir*

## **A. Pendahuluan**

Penanganan masalah kemiskinan selama ini didasarkan pada asumsi bahwa kemiskinan merupakan fenomena rendahnya kesejahteraan dan kurangnya penguasaan terhadap sumber daya. Padahal sebenarnya fenomena kemiskinan sangat kompleks dan bersifat multidimensional. Masalah kemiskinan ditandai oleh banyak faktor: misalnya kerentanan, ketidakberdayaan, tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, kondisi fisik yang lemah akibat kurangnya gizi, tingginya tingkat ketergantungan mereka dan terefleksikannya dalam budaya kemiskinan yang digariskan satu generasi ke generasi berikutnya. Kemiskinan itu sendiri bukanlah hal yang melekat pada diri orang miskin itu sendiri seperti ketidakberdayaan, kerawanan, kelemahan fisik, isolasi dan kemiskinan itu sendiri, dan dapat pula merupakan sesuatu yang bersifat eksternal seperti kebijaksanaan pembangunan yang lebih mendukung perkembangan lapisan masyarakat ekonomi kuat ketimbang lapisan masyarakat lemah.

Rendahnya kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat desa dalam mengelola pembangunan perlu di segera ditindaklanjuti dengan suatu program pemberdayaan masyarakat desa. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diperlukan penguatan secara sistematis kelembagaan yang ada untuk menjalankan kebijakan pemerintah pusat dan daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

Upaya mempercepat pembangunan, khususnya di pedesaan erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa. Partisipasi masyarakat ini dimulai dari perumusan persoalan, perencanaan, pengelolaan, pengendalian kegiatan dan penilaian keberhasilan pembangunan. Melalui pendekatan partisipasi masyarakat ini diharapkan masyarakat pada akhirnya memiliki kemampuan membangun dirinya sendiri dan lingkungannya secara swadaya dan berkelanjutan. Swadaya masyarakat merupakan semangat untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada pihak luar atau kekuatan dari atas dengan memanfaatkan sumberdaya yang mereka miliki. Swadaya masyarakat juga dapat dipahami sebagai kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan fasilitas-fasilitas yang telah tersedia sebagai hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2014 telah meluncurkan dan melaksanakan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya atau yang sering disingkat dengan Program DMIJ. Panduan utama yang digunakan adalah Petunjuk Teknis Operasional 2014. Untuk tahun 2015, 2016 dan 2017, dengan berbagai masukan dari lapangan, hasil konsolidasi dengan BPKP perwakilan Provinsi Riau, Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir dan berbagai pihak, maka pada tahun 2015, 2016 dan 2017 diterbitkan Petunjuk Teknis Operasional yang baru sebagai penyempurnaan dari Petunjuk Teknis Operasional sebelumnya. Diharapkan dengan adanya Petunjuk Teknis Operasional ini dapat menjawab kebutuhan.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*): Studi Kasus Pada Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Di Kabupaten Indragiri Hilir?

- b. Apakah kelebihan dan kelemahan dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*): Studi Kasus Pada Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Di Kabupaten Indragiri Hilir?

## 2. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*): Studi Kasus Pada Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Di Kabupaten Indragiri Hilir?
- b. Menganalisis kelebihan dan kelemahan dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*) Studi Kasus Pada Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Di Kabupaten Indragiri Hilir?

## B. Tinjauan Teoritis

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman (2002: 70), implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Guntur Setiawan (2004:39) berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Implementasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan (S. Wahab, 2005: 64).

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab (2005: 64), adalah Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke II Cetakan I 1991 mengatakan bahwa "Implementasi adalah pelaksanaan / penerapan : pertemuan kedua bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino 2007 : 176) mendefinisikan Implementasi Kebijakan, sebagai : "tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok Pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan" Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

### 1. Konsep Pemberdayaan

Pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu arti dan makna keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Kartasmita (1997 : 2) keberdayaan (Masyarakat) dapat dipakai sebagai kemampuan individu yang bersatu dalam masyarakat dengan membangun

keberdayaan. Beberapa ahli mengemukakan pengertian dan pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara Pemberdayaan (Suharto 2005 : 58-59).

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang lemah atau tidak beruntung. (If, 1995)
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. (Parsons, et, al, 1994)
- c. Pemberdayaan menunjukan pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan, melalui perubahan struktur sosial. (Swift dan Lefin, 1987)
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas ) kehidupannya (Rappaprot, 1984).

Dapat disimpulkan Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat dengan tujuan memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah yang lebih baik secara berkesinambungan.

## **2. Konsep Pembangunan**

Secara etimologi pembangunan berasal kata bangun di beri awalan “pe” dan akhiran “an” guna menunjukan perihal pekerjaan membangun itu dilaksanakan. Kata bangun setidaknya setidaknya memiliki tiga arti. *Pertama*, bangun dalam artian sadar atau siuma. *Kedua*, berarti bentuk. *Ketiga*, bangun yang berarti kata kerja.

Para ahli banyak menggunakan istilah dalam mendefinisikan istilah pembangunan. Antara lain dengan menggunakan kata modernisasi, perubahan sosial (*social change*) *develobment*, perubahan (*growth*) dan sebagainya.

Pembangunan sebagai suatu perubahan sosial di defenisikan oleh Sondang P. Siangan (dalam Nadraha) adalah suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara, Pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan masyarakat (*National Building*).

Dari berbagai defenisi yang dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, kebersamaan, kesempatan, kemandirian dan saling ketergantungan masyarakat, yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

## **3. Konsep Desa Maju Inhil Jaya**

Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya yang selanjutnya disebut atau disingkat Program DMIJ merupakan Penjabaran dari visi dan misi Bupati Indragiri Hilir Terpilih serta penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018.

Pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2014 telah meluncurkan Program DMIJ. Dan sebagai dasar hukum utama dalam pelaksanaan program tersebut telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018.

Sebagai pedoman umum dalam implementasi Program DMIJ telah di terbitkan Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2015 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya. Sedangkan sebagai Petunjuk Teknis Operasional Program DMIJ telah dikeluarkannya

Peraturan Bupati Indragiri Hilir, yang dalam perkembangannya regulasi ini setiap tahunnya mengalami perbaikan dan penyempurnaan.

Tujuan umum Program DMIJ adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat desa dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun tujuan khususnya meliputi:

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan;
- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal dengan mempertimbangkan kelestariannya;
- c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan;
- d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar yang diprioritaskan oleh masyarakat;
- e. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar Desa melalui Badan Kerjasama Desa dan (BKD) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD);
- f. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan perbaikan lingkungan hidup.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif dipilih guna memperoleh pemahaman yang otentik dari pemangku kepentingan yakni orang-orang yang berhubungan erat dengan topik penelitian, dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir sebagai OPD yang bertanggungjawab terhadap Program Desa Maju Inhil Jaya. Disamping itu fasilitator kabupaten sebagai Mitra Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai Fasilitator atau Pendamping dalam mensukseskan terhadap Program Desa Maju Inhil Jaya di Kabupaten Indragiri Hilir.

### **D. Hasil dan Pembahasan**

Sejak diluncurkannya Program DMIJ di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2014 yang lalu, pemerintah kabupaten Indragiri Hilir telah menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk mendukung program tersebut. Berikut data rekapitulasi penyaluran dana Program DMIJ yang Bersumber Dari Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Kepada Desa, sejak tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun 2017. Berikut tabel rekapitulasi penyaluran Dana Program DMIJ Tahun Anggaran 2014 – 2017.

**TABEL.1**  
**Rekapitulasi Penyaluran Dana Program DMIJ**  
**Tahun Anggaran 2014 - 2017**  
**Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Kecamatan	2014	2015	2016	2017
1	Reteh	6,450,000,000	7,675,344,000	6,574,948,000	6.875.919,000
2	Enok	5,350,000,000	6,872,989,000	6,118,133,000	6.642.249,000
3	Kuala Indragiri	3,200,000,000	4,273,584,000	4,285,065,000	4.517.105,000
4	Tempuling	3,450,000,000	3,834,874,000	3,118,284,000	3.337.373,000
5	Gaung Anak Serka	4,450,000,000	6,071,980,000	5,271,503,000	5.482.830,000
6	Mandah	7,600,000,000	11,183,381,000	10,193,436,343	11.033.172,000
7	Kateman	4,050,000,000	5,904,203,000	4,839,538,000	5.256.034,000
8	Keritang	9,800,000,000	11,943,676,000	10,088,631,000	10.500.264,000
9	Tanah Merah	4,750,000,000	6,481,849,000	5,571,224,000	6.077.807,000
10	Batang Tuaka	5,250,000,000	7,850,240,000	7,046,997,000	7.701.432,000
11	Gaung	8,300,000,000	10,908,300,000	9,289,903,000	10.095.227,000
12	Temblahan Hulu	1,700,000,000	3,146,788,000	2,538,510,000	2.669.091,000
13	Kemuning	5,700,000,000	6,932,388,000	6,297,550,000	6.673.077,000
14	Pelangiran	8,100,000,000	10,526,190,000	9,165,890,000	9.543.642,000
15	Teluk Beengkong	7,850,000,000	8,594,681,000	7,233,162,000	7.632.419,000
16	Pulau Burung	8,650,000,000	8,865,667,000	7,568,517,000	8.339.236,000
17	Concong	2,200,000,000	3,182,039,000	2,911,889,000	2.962.834,000
18	Kempas	5,500,000,000	7,057,306,000	5,870,710,000	6.258.749,000
19	Sungai Batang	2,900,000,000	4,242,827,100	3,855,992,000	4.139.271,000
	<b>Jumlah</b>	<b>105.250.000.000</b>	<b>135.548.306.100</b>	<b>117.839.882.000</b>	<b>125.737.935.000</b>

Sumber: Laporan Tahunan Program DMIJ Tahun 2016

Berdasarkan tabel 1 di atas, diperoleh gambaran bahwa terjadi fluktuasi jumlah anggaran Program DMIJ dari tahun ketahun. Bila dibandingkan antara jumlah anggaran antara tahun 2015 dengan 2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejumlah Rp. 30.298.306.100. Namun di tahun berikutnya, apabila dibandingkan jumlah anggaran antara tahun 2016 dengan 2015, justru mengalami penurunan sejumlah Rp. 17.708.424.100, meskipun pada tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan bila dibandingkan jumlah anggaran pada tahun 2016 yakni Rp. 7.898.053.000.

Fluktuasi jumlah anggaran dana Program DMIJ sebagaimana dipaparkan pada tabel diatas, ini tidak terlepas dari pengaruh pluktuasinya jumlah APBD Kabupaten Indragiri Hilirdari Tahun ketahun, sehingga secara otomatis mempengaruhi besaran Aalokasi Dana Desa, karena Alokasi Dana Desa dihitung 10% dari Total APBD Tahun Berjalan. Hal ini sejalan dengan petikan wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hilir H.Yulizal, Sos, MM:

*“.....selain perkembangan positif yang dapat kita rasakan dengan adanya Program DMIJ ini, salah satu yang menjadi faktor kendala bagi kami adalah terjadinya penurunan APBD Kabupaten akibat turunnya DAK dan DBH yang kita terima dari*

APBN setiap tahunnya. Alhasil, karena sudah diatur besaran ADD 10% dari total APB, maka mau-tidak mau terpaksa ADD juga kita turunkan (wawancara dengan H.Yulizal)

Sejalan apa yang telah disampaikan Yulizal, Saefuddin Ayub selaku Leader Fasilitator Kabupaten program DMIJ juga menuturkan hal yang sama:

“.....sebenarnya kita terbentur oleh faktor jumlah anggaran yang dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Selanjutnya dana yang minim tersebut mesti dibagi ke empat bidang yaitu: Bidang Pemerintahan Desa meliputi honor perangkat dan operasional Kantor dan perangkat Desa; Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pembangunan Desa (wawancara dengan Wawancara dengan Saefuddin Ayub)

## 1. Program Arah dan Prioritas Penggunaan Dana Program DMIJ

### a. Kegiatan di Bidang Pembangunan

**Tabel 2**  
**Kegiatan Pembangunan Program DMIJ**

NO	KEGIATAN	2014	2015	2016	2014 s/d 2016	Satuan
1	Jalan/Rabat Beton/Badan Jalan/Sirtu	107,645	107,645	83,092	331,246	M
2	Jerambah	1,610	1,610	2,521	5,117	M
3	Jembatan	111	111	30	261	Unit
4	Box Culvert / Gorong-gorong	8	8	1	115	Unit
5	Tembok Penahan Tanah/Turap	1,102	1,102	1,980	4,835	M
6	Dermaga	33	33	6	50	Unit
7	Air Bersih	30	30	36	76	Unit
8	MCK	-	-	12	22	Unit
9	Drainase	294	294	-	737	M
10	Pasar Desa	320	320	90	1,322	M2
11	Listrik Desa	-	-	4	154	Unit
12	Halaman kantor Desa	-	-	-	2,760	M2
13	Normalisasi Kanal	-	-	-	8,500	M
14	Gedung PAUD	9	9	1	11	Unit
15	Perpustakaan Desa	-	-	-	2	Unit
16	Gedung Posyandu	1	1	1	3	Unit
17	Kantor Desa	7	7	7	21	Unit
18	Balai Desa / Gedung Serbaguna	7	7	4	29	Unit
19	Pagar	254	254	96	1,033	M
20	Gapura/Gerbang	6	6	1	9	Unit
21	Pesanggrahan	14	14	-	19	Unit
22	Bak Air	57	57	-	58	Unit
23	Pos keamanan Terpadu	60	60	2	62	Unit

Sumber : Data Olahan Penulis

Berdasarkan paparan dari tabel 2 di atas, dapat diperoleh informasi, bahwa terdapat beberapa program prioritas di bidang pembangunan dalam program DMIJ. Diantara program prioritas tersebut, yang paling menduduki jumlah tertinggi adalah Badan Rabat Beton

**Tabel 3**  
**Biaya Kegiatan Pembangunan Program DMIJ**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2014 s/d 2016</b>
1	Jalan/Rabat Beton/Badan Jalan/Sirtu	26,797,226,800	22,679,476,218	18,392,270,474	67,868,973,492
2	Jerambah	3,054,110,500	4,725,295,905	6,754,639,800	14,534,046,205
3	Jembatan	7,037,026,481	9,729,065,933	3,584,934,000	20,351,026,414
4	Box Culvert / Gorong-gorong	531,151,700	263,960,400	74,211,300	869,323,400
5	Tembok Penahan Tanah/Turap	3,075,124,800	1,304,761,355	963,177,900	5,343,064,055
6	Dermaga	1,027,781,200	907,090,300	261,356,700	2,196,228,200
7	Air Bersih	304,710,700	1,528,598,445	1,542,178,106	3,375,487,251
8	MCK	448,616,200	-	630,224,700	1,078,840,900
9	Drainase	234,023,300	161,046,300	233,137,000	628,206,600
10	Pasar Desa	673,851,500	318,155,800	40,000,000	1,032,007,300
11	Listrik Desa	99,407,000	-	193,704,233	293,111,233
12	Halaman	623,183,300	-	26,608,000	623,183,300
13	Normalisasi Kanal	129,038,100	-	-	129,038,100
14	Gedung PAUD	155,807,800	1,440,909,900	-	1,623,325,700
15	Perpustakaan Desa	199,410,300	-	1,015,829,380	199,410,300
16	Gedung Posyandu	34,683,200	127,035,500	549,584,370	161,718,700
17	Kantor Desa	709,561,000	3,853,669,930	234,700,100	5,579,060,310
18	Balai Desa / Gedung Serbaguna	2,063,754,800	1,809,997,300	13,219,000	4,423,336,470
19	Pagar	937,870,000	441,384,400	-	1,613,954,500
20	Gapura/Gerbang	55,552,300	189,570,700	160.356.100	258,342,000
21	Pesanggrahan	107,312,100	441,397,700	18,392,270,474	548,709,800
22	Bak Air	99,695,700	4,614,991,318	6,754,639,800	4,714,687,018
23	Pos Keamanan Terpadu	26,797,226,800	4.855.768.724,5	3,584,934,000	5.016.124.824,5

Sumber : Data Olahan Penulis

b. Kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1) Kegiatan Magrib Mengaji

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Murid</b>	<b>Jumlah Guru</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>
2014	24.599	1.890	Rp. 2.912.540.000,-
2015	30.749	2.527	Rp. 2.967.332.000,-
2016	28.914	2.372	Rp. 5.626.592.000,-
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 11.506.364.100,-</b>

Sumber : Data Olahan Penulis

2) Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Murid</b>	<b>Jumlah Guru</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>
2014	5.017	803	Rp. 6.400.027.25,-
2015	6.308	913	Rp. 1.269.918.700,-
2016	6.073	869	Rp. 1.380.150.000,-
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 9.050.095.915,-</b>

Sumber : Data Olahan Penulis

3) Kegiatan Posyandu

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Posyandu</b>	<b>Jumlah Kader</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>
2014	183	1.743	Rp. 1.098.297.700,-
2015	183	1.819	Rp. 1.688.158.000,-
2016	197	1.874	Rp. 2.192.510.000,-
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 4.978.965.700,-</b>

Sumber : Data Olahan Penulis

### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) di Kabupaten Indragiri Hilir secara umum dapat dikatakan sudah dilaksanakan secara optimal sesuai kebijakan yang telah dirumuskan. Pelaksanaan Program DMIJ dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 3 tahap yakni, pertama, Tahap Perencanaan, kedua tahap pelaksanaan dan ketiga, tahap pelestarian.
2. Berbagai prestasi yang telah ditoreh, seperti di bidang Pembangunan sarana dan prasarana seperti jembatan, jalan, jerambah dan sarana air bersih, dibidang pemberdayaan masyarakat desa telah dilaksanakan berbagai pengembangan kapasitas kelembagaan, kelompok dan warga desa, dibidang pembinaan kemasyarakatan juga telah tampak nyata hasilnya seperti program magrib mengaji, bantuan insentif guru PAUD serta pembinaan kader pos yandu. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah pemberdayaan dibidang pemerintahan desa telah dilaksanakan berbagai pembenahan dan pemenuhan infrastruktur pemerintahan, seperti pembangunan kartor kepala desa, BPD, LPM, Gedung Serbaguna, Gedung satu atap Babinkantibmas serta pengembangan kapasitas aparatus pemerintahan desa.
3. Selain perestasi-prestasi yang telah ditorehkan diatas, dalam implementasi program DMIJ juga masih mengalami beberapa kendala, yakni; faktor keterbatasan jumlah dana,

karena sumber pendanaan Program DMIJ sebahagian besar bersumber dari Alokasi Dana Desa yang jumlahnya 10% dari total APBD, sementara besaran APBD Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Selanjutnya faktor masih terbatasnya Sumber Daya Manusia sebahagian perangkat desa dalam menggunakan perangkat teknologi komputer, sehingga masih menjadi faktor penghambat lemahnya pengoprasionalan yang berbasis aplikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adistina, Raharjo, 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta : Gaha Ilmu.
- Faisal, Sanapiah, 1999. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Kaho, Josef Riwu, 2007. *Prospek Otonomi di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jalannya Otonomi Daerah*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1997. *Makalah Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat*.
- Keiffer, C. H., 1984. *Citizen Empowerment : A Development*. London : Mac Milan Kuswata,  
R. Agustoha, 1985. *Manajemen Pembangunan Desa*. Jakarta : Grafindo Utama.
- Nawawi, Hadari dan Martini, Mimi, 1994. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Ndraha Talidziduhu, 1987. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharto, Edi, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Sebuah Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Model-model Pembangunan*. Yogyakarta :Gava Media.
- Terbitan Berkala*
- Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Inhil Jaya Tahun 2014
- Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Inhil Jaya Tahun 2015
- Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Inhil Jaya Tahun 2016
- Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Inhil Jaya Tahun 2017